

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang. Maka pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengelolaan Barang disertai dengan pencatatan Barang Milik Negara tersebut dalam Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang. Untuk mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Dan pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang
2. Prosedur pelaksanaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dilakukan dengan metode topdown yaitu pelaksanaannya dimulai dari kpengguna barang mengajukan permohonan penetapan status dengan pembuatan surat permohonan dan diterima oleh kepala KPKNL untuk disiposisikan permohonan dengan menugaskan seksi pengelolaan Kekayaan Negara untuk meneliti kelengkapan dokumendan lanjut

menyusun konsep surat keputusan penetapan status oleh pelaksana yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala KPKNL jika sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuannya.

3. Hambatan dalam kegiatan Penetapan status penggunaan barang milik negara antara lain:
  - Dalam proses penetapan status penggunaan barang milik Negara masih menggunakan sistem manual dan belum digital.
  - Memiliki sumber daya manusia yang terbatas
4. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam kegiatan penetapan status penggunaan barang milik negara yaitu dengan cara tim pengelolaan kekayaan negara bekerja lembur untuk melaksanakannya sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

## 5.2 Saran

Untuk kelancaran dari proses Penetapan Status Penggunaan Barang milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Padang. Maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan Penetapan Status Penggunaan Barang milik Negara, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Padang sebaiknya meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya dan kepala KPKNL agar proses pengelolaan Kekayaan Negara berjalan dengan efektif.

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Padang sebaiknya meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) bertujuan untuk mencapai keberhasilan yang ingin diwujudkan dari sebuah instansi untuk melakukan sebuah pekerjaan tentunya harus memiliki pegawai dengan kinerja yang bagus dan memiliki tim yang cukup untuk melakukan Penetapan Status Penggunaan terhadap Barang Milik Negara (BMN)
3. KPKNL khususnya seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, untuk lebih teliti lagi dalam pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, Dan perlu adanya tingkatan kerja dengan menggunakan sistem digital. tingkatan kinerja manual yang dilakukan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menyebabkan kurang optimalnya hasil yang dicapai.

